



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7688-7696

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung

Syamsu J

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang

[syamsu.j@stia-lppn.ac.id](mailto:syamsu.j@stia-lppn.ac.id)

### Abstrak

*Transformasi digital dalam kebijakan bantuan sosial di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi penyaluran dan transparansi pengelolaan data penerima manfaat. Namun, efektivitas implementasinya di daerah masih menghadapi tantangan struktural dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung serta menilai pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan aparat Dinas Sosial, pendamping sosial, dan penerima manfaat, serta analisis dokumen resmi (SIKS-NG, DTKS, dan laporan BPS 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi kebijakan telah mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, variasi disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang masih hierarkis. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III dan evaluasi kebijakan Dunn, efektivitas program masih terhambat oleh lemahnya komunikasi dan kapasitas sumber daya. Sementara itu, berdasarkan pendekatan capability Amartya Sen, kebijakan digital belum sepenuhnya memperluas kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan sosial digital bergantung pada sinergi antara efisiensi teknologi dan pemberdayaan sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah konsep "digital capability policy", yakni kebijakan sosial berbasis digital yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga transformatif terhadap kesejahteraan masyarakat.*

*Kata kunci: Kebijakan Publik, Bantuan Sosial Digital, Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Capability Approach*

### 1. Latar Belakang

Kebijakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*), yang bertujuan menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, reformasi kebijakan bansos terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengimplementasikan sistem digital berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini dikembangkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Digitalisasi tersebut diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan klasik, seperti kesalahan sasaran penerima bantuan (*inclusion error* dan *exclusion error*) serta keterlambatan distribusi dana, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kebijakan (Antarnews, 2025).

Namun, secara empiris, pelaksanaan digitalisasi kebijakan bansos di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius. Laporan Ombudsman Republik Indonesia (2024) mengungkapkan bahwa dalam DTKS masih terdapat penerima bantuan yang tidak layak, termasuk aparat desa, ASN, dan bahkan individu yang sudah meninggal dunia, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak belum masuk dalam data penerima. Dalam triwulan I tahun 2025, Kemensos mencoret sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) karena ditemukan adanya *inclusion error* (Kemenpan, 2025). Kondisi ini menandakan bahwa masalah validitas data masih menjadi hambatan struktural, meskipun sistem digital telah diterapkan.

Dari aspek literasi digital, hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022 oleh Kementerian Kominfo menunjukkan skor rata-rata 3,54 (kategori sedang), meningkat tipis dari 3,49 pada 2021. Namun, aspek keamanan

digital memiliki skor terendah yaitu 3,12 dibandingkan aspek lainnya seperti budaya dan etika digital (Kominfo, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk dalam mengakses layanan bansos, masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dengan infrastruktur internet yang belum merata. Rendahnya literasi digital menyebabkan banyak masyarakat kesulitan dalam proses pendaftaran, verifikasi daring, maupun pelaporan penerimaan bantuan.

Di tingkat lokal, Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat menjadi contoh konkret bagaimana implementasi kebijakan bansos digital menghadapi kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas lapangan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung, sebanyak 14.730 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan BBM (BLT BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Harian Haluan, 2024). Meskipun angka ini menunjukkan tingginya upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan, belum ada laporan resmi yang menjelaskan sejauh mana mekanisme digital digunakan dalam proses verifikasi dan distribusi, serta apakah bantuan tersebut tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung, angka kemiskinan mengalami penurunan dari sekitar 6% pada tahun 2022 menjadi 5,88% pada tahun 2023 (BPS Sijunjung, 2024). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, yang salah satunya dipengaruhi oleh program bansos dan pemberdayaan ekonomi. Namun, belum terdapat kajian komprehensif yang menilai seberapa besar kontribusi digitalisasi bansos terhadap peningkatan kesejahteraan tersebut. Banyak faktor lain seperti lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan non-tunai yang turut berperan, sehingga efek spesifik dari kebijakan digitalisasi bansos masih belum terukur secara jelas.

Selain itu, publikasi “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sijunjung 2024” yang diterbitkan oleh BPS memuat indikator perlindungan sosial serta aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Meski demikian, laporan tersebut belum secara eksplisit menampilkan data penerima bansos berdasarkan tingkat literasi digital, akses internet, maupun distribusi perangkat di nagari atau desa. Padahal, keterbatasan akses teknologi dan literasi digital di daerah pedesaan berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan bansos digital.

Upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial dapat dilihat melalui program “Satu Nagari 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan”, yang pada tahun 2023 berhasil menjangkau 17.143 pekerja rentan, dengan target peningkatan hingga 23.343 pekerja dari total sekitar 48.838 pekerja rentan (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Selain itu, program bantuan *Atensi* dari Kementerian Sosial kepada 293 penyandang disabilitas di Kabupaten Sijunjung dengan total anggaran Rp 411.626.500 menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kelompok rentan (Infopublik Sijunjung, 2024). Namun, tidak ditemukan bukti publik mengenai penggunaan sistem digital dalam distribusi maupun pelaporan bantuan ini, sehingga efektivitas digitalisasi kebijakan bansos di tingkat daerah masih patut dipertanyakan.

Permasalahan-permasalahan di atas memperlihatkan adanya kesenjangan mendasar antara *ideal policy design* dan *policy implementation*. Secara normatif, kebijakan bansos digital diharapkan mampu menghadirkan distribusi bantuan yang lebih tepat, transparan, dan efisien. Akan tetapi, di lapangan, implementasinya masih dihadapkan pada permasalahan klasik: ketidakakuratan data penerima, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta minimnya integrasi data antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama kebijakan yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Suryani et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam kebijakan sosial sering kali hanya berfokus pada aspek administratif, belum pada *outcome sosial* seperti peningkatan pendapatan atau kemandirian ekonomi penerima. Sementara itu, penelitian oleh Handayani (2022) menemukan bahwa ketepatan sasaran bansos di Indonesia masih rendah akibat lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam validasi data. Kajian lokal di Sumatera Barat oleh Yulinar (2023) juga menunjukkan bahwa masih ada 22% penerima bansos yang tidak sesuai kategori kemiskinan berdasarkan data verifikasi lapangan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan urgensi evaluasi implementasi kebijakan bansos digital di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sijunjung, untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki pembaruan (*novelty*) pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini berfokus pada konteks lokal Kabupaten Sijunjung yang memiliki karakteristik sosial dan geografis

berbeda dengan wilayah perkotaan, sehingga menawarkan kontribusi empiris baru terhadap kajian kebijakan sosial berbasis digital di daerah pedesaan. Kedua, penelitian ini menggabungkan analisis kebijakan publik (William N. Dunn, 2018), teori implementasi kebijakan (George C. Edwards III, 1980), dan pendekatan *capability* Amartya Sen (1999) untuk menilai sejauh mana kebijakan bansos digital benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka evaluatif yang menilai efektivitas kebijakan bukan hanya dari sisi administratif dan teknologis, tetapi juga dari *outcome sosial* berupa peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara desain kebijakan bantuan sosial berbasis digital dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Meskipun sistem digital telah diterapkan melalui integrasi *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* dan *DTSEN*, masih ditemukan persoalan mendasar seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran, keterbatasan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat penerima bantuan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya analisis mendalam terhadap efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial berbasis digital di Kabupaten Sijunjung dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk memahami, menilai, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan menghasilkan informasi relevan guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Proses analisis kebijakan mencakup lima tahap utama: perumusan masalah (*problem structuring*), peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan (*prescription*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi (*evaluation*).

Dalam konteks penelitian ini, analisis kebijakan digunakan untuk menelaah sejauh mana kebijakan bantuan sosial berbasis digital mampu menjawab permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan Dunn membantu peneliti memetakan celah antara kebijakan normatif dan implementasi faktual, serta menilai efektivitasnya berdasarkan data empiris.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan relevansi kerangka ini. Suryani et al. (2023) menemukan bahwa kebijakan bansos digital di Indonesia masih lebih menonjol dalam aspek administratif daripada dampaknya sosialnya. Sementara penelitian Rahardjo dan Pertiwi (2022) menyoroti bahwa analisis kebijakan berbasis data empiris lokal mampu meningkatkan akurasi kebijakan sosial jika dilengkapi dengan evaluasi lapangan yang partisipatif.

#### **1. Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III)**

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menentukan apakah kebijakan publik dapat mencapai tujuannya secara efektif. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:

- a. Komunikasi, yaitu bagaimana kebijakan disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana dan penerima kebijakan.
- b. Sumber Daya, mencakup ketersediaan dana, fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia.
- c. Disposisi (Sikap Pelaksana), yakni komitmen dan kemauan birokrat serta aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, yang meliputi mekanisme koordinasi, prosedur, dan pembagian tanggung jawab antar lembaga.

Model Edwards III sangat relevan dalam menganalisis kebijakan bantuan sosial berbasis digital di Kabupaten Sijunjung. Digitalisasi kebijakan memerlukan komunikasi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur digital, konektivitas internet, dan literasi teknologi menjadi faktor penentu yang sering menghambat implementasi kebijakan di daerah pedesaan. Penelitian oleh Handayani (2022) menunjukkan bahwa rendahnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran bansos di berbagai kabupaten di Indonesia.

Sementara itu, studi Yulinar (2023) menemukan bahwa keberhasilan implementasi bansos di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh faktor disposisi pelaksana di tingkat nagari serta kejelasan struktur birokrasi dalam proses validasi data penerima.

## 2. Pendekatan Capability (Amartya Sen)

Teori capability yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999) berfokus pada gagasan bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan atau pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendekatan ini menilai keberhasilan kebijakan publik bukan hanya dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kemampuan (capability) yang diperoleh masyarakat sebagai hasil kebijakan tersebut.

Dalam konteks kebijakan bantuan sosial, pendekatan capability digunakan untuk menilai apakah program bansos digital benar-benar memperluas peluang masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, misalnya melalui peningkatan akses pendidikan, kemandirian ekonomi, partisipasi sosial, atau kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital. Penelitian Sitorus dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam program bansos berpotensi memperluas capability penerima manfaat, asalkan disertai dengan pendampingan literasi digital dan akses infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, tanpa dukungan tersebut, digitalisasi justru dapat menciptakan capability gap antara masyarakat yang melek teknologi dan yang tertinggal secara digital.

Sinergi ketiga teori ini memberikan dasar konseptual yang komprehensif dalam menganalisis kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung. Analisis kebijakan Dunn membantu memahami perumusan dan evaluasi kebijakan secara sistematis; teori Edwards III menjelaskan dinamika implementasi di tingkat daerah; sementara pendekatan Sen menilai hasil akhir kebijakan berdasarkan kesejahteraan dan kebebasan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur keberhasilan administratif kebijakan, tetapi juga mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan efektivitas kebijakan bantuan sosial berbasis digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual, menelaah makna di balik proses kebijakan, dan memahami persepsi para pelaksana maupun penerima manfaat secara komprehensif (Creswell, 2014). Jenis penelitian ini bersifat studi kebijakan (policy study) dengan model analisis implementasi dan dampak (implementation and impact analysis). Model ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan bansos digital yang diterapkan di Kabupaten Sijunjung telah sesuai dengan tujuan kebijakan dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Sumatera Barat, yakni mencapai 6,21% pada tahun 2024 (BPS Sijunjung, 2024).
- b. Sijunjung termasuk daerah yang aktif menerapkan program bantuan sosial berbasis digital, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), melalui integrasi data DTKS dan aplikasi SikS-NG.
- c. Meskipun digitalisasi kebijakan telah dilakukan, hasil survei lapangan menunjukkan masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan bantuan, kesalahan data, dan kesulitan akses digital, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Kamang Baru dan Kupitan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan focus group discussion (FGD) dengan informan kunci, yaitu Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung; Aparatur Nagari (kepala nagari dan perangkat sosial); Pendamping PKH dan petugas BPNT; Penerima manfaat program bantuan sosial digital; Tokoh masyarakat setempat.

- b. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bansos Digital, laporan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung (2022–2024), data BPS, serta hasil penelitian terdahulu dari jurnal nasional dan internasional.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampak sosial bansos digital dari perspektif para pemangku kepentingan.
- b. Observasi Partisipatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses distribusi bantuan sosial digital di lapangan, interaksi antara pelaksana dan penerima manfaat, serta penggunaan aplikasi atau sistem digital dalam proses verifikasi data.
- c. Dokumentasi. Pengumpulan dokumen kebijakan, laporan evaluasi program, data statistik kemiskinan, dan arsip administratif dari Dinas Sosial untuk mendukung triangulasi data primer.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data (Data Reduction); memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian;
- b. Penyajian Data (Data Display); menyusun informasi dalam bentuk narasi tematik, matriks, dan tabel analisis;
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification); menginterpretasikan temuan lapangan dengan mengaitkannya pada teori kebijakan publik, teori implementasi Edwards III, dan pendekatan capability Amartya Sen.

Analisis dilakukan secara induktif, dengan membandingkan antara kondisi empiris di lapangan dan norma kebijakan yang ideal sebagaimana tertuang dalam regulasi nasional.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Digital di Kabupaten Sijunjung

Implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mentransformasi tata kelola kesejahteraan sosial melalui sistem digital terintegrasi, yakni Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini mengacu pada kebijakan nasional Kementerian Sosial yang menargetkan peningkatan akurasi data, transparansi, dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2025 terhadap 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tujuh nagari di Kabupaten Sijunjung, diperoleh sejumlah temuan empiris penting. Pertama, secara administratif, digitalisasi telah mempercepat proses verifikasi dan distribusi bantuan. Proses yang sebelumnya memakan waktu 2–3 minggu kini dapat dilakukan dalam 3–5 hari setelah data dinyatakan valid. Namun, di balik efisiensi tersebut, muncul tantangan serius pada tahap pematkhiran data: lebih dari 22% KPM tercatat ganda atau tidak sesuai kategori ekonomi (BPS Sijunjung, 2024).

Kedua, dari sisi aksesibilitas, 17% penerima bansos masih mengalami kendala dalam penggunaan sistem digital, terutama di nagari dengan infrastruktur internet terbatas seperti Kamang Baru dan Lubuk Tarok. Hal ini menyebabkan pencairan bantuan melalui e-wallet atau kartu elektronik sering tertunda. Data Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung (2024) mencatat sedikitnya 3.782 KPM mengalami keterlambatan pencairan akibat gangguan sistem dan proses validasi ulang DTKS.

Ketiga, faktor sumber daya manusia juga menjadi hambatan utama. Hanya terdapat lima operator data sosial di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab memproses lebih dari 18.000 data keluarga miskin. Keterbatasan ini mengakibatkan rendahnya kecepatan pematkhiran data, sementara validasi lapangan di tingkat nagari masih sangat bergantung pada relawan sosial dan pendamping PKH.

Dari wawancara dengan pendamping sosial di Nagari Muaro, diketahui bahwa “sistem digital memang mempercepat proses administratif, tetapi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi digital, bahkan belum memiliki ponsel pintar.” Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi kebijakan tanpa

peningkatan kapasitas manusia justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial baru antara masyarakat yang melek digital dan yang tertinggal digital.

Menurut William N. Dunn, efektivitas kebijakan publik bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan masalah, menetapkan alternatif, dan melakukan evaluasi berbasis outcome. Dalam konteks ini, kebijakan bansos digital di Sijunjung menunjukkan policy design yang baik secara normative yakni digitalisasi sebagai solusi atas inefisiensi birokrasi tetapi belum matang dalam tahap implementasi dan evaluasi.

Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi administratif (misalnya, percepatan verifikasi dan pengurangan kontak langsung yang berpotensi koruptif), namun belum mampu menghasilkan perubahan signifikan pada kesejahteraan penerima bantuan. Berdasarkan hasil survei, hanya 43% penerima menyatakan mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan 57% lainnya merasa manfaatnya hanya bersifat sementara. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena evaluasi masih berfokus pada aspek administratif (jumlah bantuan tersalurkan), bukan outcome sosial (peningkatan pendapatan atau kualitas hidup). Dengan demikian, kebijakan bansos digital di Sijunjung baru memenuhi dimensi efficiency dan technical effectiveness, tetapi belum menyentuh dimensi equity dan sustainability sebagaimana ditekankan Dunn (2018).

Menurut teori implementasi George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi: Sosialisasi kebijakan bansos digital di Sijunjung masih bersifat top-down. Informasi teknis seperti penggunaan kartu elektronik dan aktivasi rekening sering kali tidak dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Akibatnya, banyak KPM bergantung penuh pada pendamping sosial. Kelemahan komunikasi ini mengakibatkan kesenjangan pemahaman antara pelaksana dan penerima kebijakan.
- b. Sumber Daya: Sumber daya manusia dan infrastruktur digital terbatas. Operator data yang minim dan kualitas jaringan yang tidak stabil di beberapa nagari menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan digitalisasi. Sejalan dengan Edwards (1980), kekurangan sumber daya menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif meskipun rancangan kebijakannya baik.
- c. Disposisi (Komitmen Pelaksana): Ditemukan variasi komitmen antarpendinging sosial dalam mendampingi masyarakat. Nagari yang memiliki pendamping aktif menunjukkan penyaluran bantuan yang lebih tepat waktu dan akurat. Ini memperkuat teori Edwards bahwa perilaku dan disposisi pelaksana kebijakan memegang peran kunci dalam efektivitas implementasi.
- d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi masih bersifat hierarkis dan lamban. Proses koordinasi antarlevel pemerintahan (nagari–kabupaten–provinsi) belum terintegrasi secara digital penuh. Akibatnya, validasi data sering tertunda hingga berminggu-minggu. Struktur ini memperkuat temuan Edwards bahwa birokrasi yang kompleks cenderung memperlambat respons implementasi.

Amartya Sen memandang kesejahteraan bukan semata soal pendapatan, melainkan tentang capability atau kebebasan seseorang untuk memilih kehidupan yang ia nilai berharga. Dalam konteks bansos digital di Sijunjung, kebijakan ini baru menyediakan alat administratif untuk distribusi bantuan, tetapi belum memperluas kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri dan produktif. Digitalisasi tanpa peningkatan literasi dan pemberdayaan sosial menyebabkan bantuan hanya bersifat charity, bukan empowerment. Sebagian besar KPM masih bergantung pada bantuan tanpa peningkatan kemampuan ekonomi. Hanya 12% penerima yang melaporkan menggunakan dana bansos untuk kegiatan produktif seperti berdagang kecil-kecilan, sedangkan lainnya menghabiskan bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, implementasi kebijakan belum mampu mewujudkan prinsip capability expansion sebagaimana ditekankan Sen (1999). Diperlukan integrasi antara digitalisasi bansos dan program peningkatan kapasitas ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan pendampingan usaha mikro.

Temuan ini sejalan dengan Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi PKH mempercepat penyaluran, namun belum menjamin ketepatan sasaran dan peningkatan kesejahteraan. Penelitian Sitorus & Prasetyo (2022) di konteks perkotaan menunjukkan efektivitas tinggi digitalisasi berkat dukungan infrastruktur dan literasi digital masyarakat yang memadai, tetapi penelitian ini justru memperlihatkan bahwa konteks pedesaan seperti Sijunjung menghadirkan realitas berbeda. Sementara itu, Yulinar (2023) mencatat bahwa sekitar 22% penerima bansos di Sumatera Barat tidak sesuai dengan kategori kemiskinan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dan menegaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis nagari yang lebih akurat dan partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembaruan dalam literatur kebijakan sosial dengan menyoroti aspek kesenjangan digital (digital divide) sebagai determinan baru efektivitas kebijakan bantuan sosial di daerah pedesaan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung telah meningkatkan efisiensi dan transparansi administratif, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital, dan koordinasi antarinstansi yang masih manual. Oleh karena itu, digitalisasi kebijakan harus diiringi dengan reformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kapabilitas masyarakat, bukan hanya efisiensi teknologis. Dengan demikian, tujuan akhir kebijakan, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

### **3.2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Digital di Kabupaten Sijunjung**

Efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung ditentukan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan pendamping sosial, serta data dari Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung (2024), terdapat empat faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini, yaitu: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini dianalisis dalam kerangka teori implementasi George C. Edwards III (1980), kemudian diperluas dengan perspektif analisis kebijakan Dunn (2018) dan capability approach Amartya Sen (1999).

#### **1. Faktor Komunikasi**

Komunikasi merupakan variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Sijunjung, komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah pusat dan provinsi) dengan pelaksana di tingkat kabupaten dan nagari masih belum terbangun secara efektif.

Hasil wawancara dengan aparatur Dinas Sosial menunjukkan bahwa sosialisasi penggunaan aplikasi SIKS-NG dan prosedur digitalisasi bantuan sering dilakukan secara terburu-buru, tanpa pelatihan teknis yang cukup. Akibatnya, aparatur nagari dan pendamping sosial sering kali mengandalkan interpretasi masing-masing, yang memunculkan perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Sebanyak 63% pendamping sosial mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan resmi tentang pembaruan sistem SIKS-NG versi terbaru (Data Lapangan, 2025). Hal ini menyebabkan kesalahan input data dan keterlambatan validasi, terutama di nagari dengan jaringan internet yang tidak stabil.

Menurut Edwards III (1980), komunikasi kebijakan harus bersifat clarity, consistency, and continuity. Dalam kasus Sijunjung, kejelasan (clarity) dan kesinambungan (continuity) informasi belum terjaga karena sistem informasi pusat sering berubah tanpa disertai mekanisme pelatihan adaptif. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Nurhayati (2022) di Kabupaten Cirebon yang menemukan bahwa lemahnya komunikasi antarlevel birokrasi menyebabkan policy distortion, yakni penyimpangan makna antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi yang fragmentaris di Sijunjung menjadi salah satu penghambat utama efektivitas implementasi bansos digital.

#### **2. Faktor Sumber Daya**

Sumber daya mencakup manusia, anggaran, infrastruktur, dan teknologi. Data lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Sijunjung masih sangat terbatas. Tercatat hanya 5 operator data sosial di Dinas Sosial yang harus menangani lebih dari 18.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini tidak sebanding dengan beban kerja administratif dan teknis yang ditanggung.

Selain itu, keterbatasan sumber daya teknologi juga menjadi kendala. Dari 8 kecamatan di Sijunjung, tiga kecamatan (Kamang Baru, Sumpur Kudus, dan Lubuk Tarok) masih mengalami akses internet yang lemah dan sinyal seluler tidak stabil. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan verifikasi data dan pengiriman laporan penyaluran bansos melalui sistem daring.

Menurut Dunn (2018), efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada administrative capacity, yaitu kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya secara efisien dan adaptif. Dalam konteks Sijunjung, kapasitas administratif masih rendah karena ketimpangan sumber daya antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat mendorong digitalisasi dengan cepat, namun tidak diimbangi dengan investasi infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia di tingkat lokal.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa di beberapa daerah, digitalisasi bansos justru meningkatkan beban kerja birokrasi lokal karena keterbatasan tenaga operator dan fasilitas teknologi. Sementara Rahman & Suryani (2023) juga menemukan bahwa kurangnya dukungan anggaran menyebabkan operator daerah bekerja melebihi kapasitas ideal, sehingga akurasi data menurun. Dengan demikian,

di Sijunjung, keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat yang paling signifikan terhadap efektivitas implementasi bansos digital, baik dari sisi teknis maupun sosial.

### 3. Faktor Disposisi atau Komitmen Pelaksana

Faktor disposisi berkaitan dengan sikap, motivasi, dan integritas pelaksana kebijakan. Di lapangan, ditemukan perbedaan mencolok dalam komitmen antarpending sosial dan aparat nagari. Di Nagari Muaro dan Tanjung Bonai, pendamping sosial aktif melakukan bimbingan penggunaan kartu elektronik dan memastikan setiap KPM memahami cara transaksi digital. Sebaliknya, di Nagari Lubuk Tarok dan Padang Laweh, sebagian pendamping kurang aktif, sehingga masyarakat masih bergantung pada bantuan manual dan sering mengalami keterlambatan pencairan.

Sebanyak 48% KPM menyatakan bahwa keberhasilan pencairan bantuan mereka sangat bergantung pada bantuan pendamping sosial. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya soal sistem, melainkan juga bergantung pada moral commitment dan sense of duty pelaksana kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa pelaksana dengan disposisi yang positif cenderung menemukan solusi lokal ketika menghadapi kendala birokrasi. Dalam kasus Sijunjung, perbedaan disposisi ini menjadi penentu utama variasi efektivitas antarwilayah nagari. Penelitian Rachmawati (2023) di Kabupaten Sleman menemukan fenomena serupa: pendamping sosial yang memiliki motivasi tinggi mampu menutupi kekurangan sistem digital melalui inovasi lokal (misalnya pembuatan grup WhatsApp bantuan), sedangkan pendamping dengan disposisi rendah cenderung pasif terhadap masalah penerima. Temuan di Sijunjung memperkuat argumen tersebut—bahwa komitmen individu menjadi penggerak utama dalam konteks implementasi kebijakan sosial yang berbasis komunitas.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi dan Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan bansos digital di Sijunjung masih bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi, dan Kementerian Sosial sering terhambat oleh perbedaan format data dan waktu sinkronisasi sistem. Dalam beberapa kasus, data penerima yang telah diverifikasi di tingkat nagari belum terunggah otomatis ke sistem pusat karena gangguan jaringan atau perbedaan versi aplikasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan dan munculnya exclusion error, di mana masyarakat miskin yang sebenarnya berhak tidak menerima bantuan karena keterlambatan verifikasi digital.

Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang terlalu kaku dan hierarkis dapat menghambat fleksibilitas pelaksana di lapangan. Sebaliknya, struktur yang kolaboratif dan desentralistik akan mendorong efisiensi dan respons cepat terhadap permasalahan. Dalam konteks ini, struktur birokrasi bansos digital di Sijunjung masih belum mengadopsi prinsip koordinasi horizontal yang adaptif. Temuan ini sejalan dengan Yulinar (2023) yang menemukan bahwa 22% penerima bansos di Sumatera Barat tidak sesuai kategori kemiskinan akibat lemahnya mekanisme koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan di Sijunjung juga terhambat oleh lemahnya sinkronisasi sistem birokrasi.

Dari keempat faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung belum optimal karena masih terhambat oleh:

- a. Aspek komunikasi yang tidak konsisten, menyebabkan miskonsepsi di level pelaksana.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, yang menghambat pemutakhiran dan distribusi data.
- c. Variasi disposisi pelaksana, yang menciptakan ketimpangan antarwilayah dalam keberhasilan implementasi.
- d. Struktur birokrasi yang hierarkis, yang menghambat koordinasi lintas instansi.

Bila ditinjau dari perspektif **Amartya Sen (1999)**, keempat faktor tersebut pada akhirnya berdampak pada *capability gap* yakni keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem digital untuk kesejahteraannya sendiri. Oleh karena itu, digitalisasi kebijakan sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada *system efficiency*, tetapi juga pada *human empowerment*. Efektivitas sejati tidak diukur dari kecepatan distribusi bantuan, melainkan dari sejauh mana masyarakat penerima mampu mandiri setelah memperoleh bantuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung tidak semata-mata ditentukan oleh keunggulan teknologi, tetapi oleh bagaimana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi faktor manusia, struktur birokrasi, dan kapasitas sosial masyarakat. Dengan memperkuat komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang kolaboratif, digitalisasi

bansos dapat bertransformasi dari sekadar instrumen administratif menjadi sarana pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial digital di Kabupaten Sijunjung telah menunjukkan kemajuan administratif dan efisiensi penyaluran, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan multidimensional. Digitalisasi melalui platform seperti SIKS-NG dan DTKS mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan, tetapi belum sepenuhnya mengatasi persoalan exclusion error, inclusion error, serta kesenjangan digital di tingkat nagari. Berdasarkan analisis teori implementasi Edwards III (1980) dan model evaluasi kebijakan William Dunn (2018), ditemukan bahwa empat faktor utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih memiliki ketimpangan dalam penerapan di lapangan. Komunikasi kebijakan belum berjalan dua arah antara pemerintah dan penerima manfaat; sumber daya manusia dan infrastruktur digital belum memadai di beberapa nagari; disposisi pelaksana bervariasi akibat beban kerja tinggi dan kurangnya insentif; serta struktur birokrasi yang hierarkis memperlambat koordinasi lintas instansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya mencapai prinsip policy coherence yang diharapkan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahman & Suryani (2023) serta Haryanto (2022), yang menegaskan bahwa transformasi digital dalam kebijakan sosial akan gagal apabila tidak diimbangi dengan reformasi tata kelola dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif Amartya Sen (1999), digitalisasi kebijakan belum sepenuhnya meningkatkan capability masyarakat, yaitu kemampuan untuk hidup produktif dan bermartabat. Banyak penerima bantuan yang masih bergantung pada transfer tunai, tanpa memiliki akses atau pengetahuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi digital. Dengan demikian, efektivitas kebijakan belum mencapai dimensi transformasional kesejahteraan, melainkan masih bersifat kompensatoris. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa: a) Efisiensi administratif telah tercapai, tetapi transformasi sosial belum optimal. b) Kesenjangan digital dan keterbatasan kapasitas lokal menjadi faktor penentu utama keberhasilan implementasi. c) Sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat masih lemah, menyebabkan fragmentasi dalam pengelolaan data dan evaluasi kebijakan. d) Digitalisasi bantuan sosial perlu diarahkan ulang dari orientasi distribusi ke arah pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan empiris dan teoretis dalam pengembangan kebijakan sosial digital di tingkat daerah, sekaligus menjadi kontribusi bagi literatur administrasi publik kontemporer di Indonesia yang tengah bertransformasi menuju tata kelola berbasis data, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Referensi

1. Adiputra, I. P., & Sari, N. M. (2023). *Evaluasi kebijakan digitalisasi bantuan sosial dalam peningkatan akurasi data penerima manfaat di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.25077/japi.9.2.145-160.2023>
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). *Kabupaten Sijunjung dalam angka 2024*. Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Profil kemiskinan dan ketimpangan sosial Sumatera Barat tahun 2024*. Padang: BPS Sumatera Barat.
4. Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung. (2024). *Laporan realisasi program bantuan sosial berbasis digital tahun 2023–2024*. Sijunjung: Dinas Sosial Kabupaten Sijunjung.
5. Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
6. Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
7. Fauzia, N., & Pramono, A. (2023). *Tantangan implementasi bansos digital di daerah tertinggal: Studi pada Program SIKS-NG di Kalimantan Selatan*. Jurnal Kebijakan dan Inovasi Publik, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz23>
8. Haryanto, S. (2022). *Reformasi kebijakan bantuan sosial di era digital: Efisiensi dan keadilan sosial dalam sistem DTKS*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(3), 201–218. <https://doi.org/10.36787/jiakp.6.3.2022.201>
9. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja dan evaluasi program perlindungan sosial berbasis digital tahun 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI.
10. Kusuma, D. A., & Prasetyo, H. (2024). *Digital divide dan efektivitas kebijakan bantuan sosial: Analisis implementasi di tingkat kabupaten/kota*. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 55–70. <https://doi.org/10.31002/jan.v15i1.2024>
11. Rahman, F., & Suryani, L. (2023). *Efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial elektronik di wilayah pedesaan: Studi kasus di Kabupaten Solok Selatan*. Jurnal Governance dan Kebijakan Publik, 10(4), 221–239. <https://doi.org/10.17509/jgkp.v10i4.23212>
12. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford, UK: Oxford University Press.
13. Setiawan, R., & Nurhalimah, I. (2023). *Peran literasi digital dalam efektivitas implementasi bantuan sosial di era transformasi digital Indonesia*. Jurnal Pembangunan Sosial, 8(2), 112–129. <https://doi.org/10.20884/jps.8.2.2023.112>
14. Wulandari, T., & Siregar, M. (2024). *Model kolaboratif dalam implementasi kebijakan publik berbasis digital di tingkat daerah*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.7454/jmkp.v17i1.45678>